

**PENGARUH IDENTITAS NASIONAL TERHADAP
KEPUTUSAN KELUARNYA TURKI DARI KONVENSI
ISTANBUL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh :

**LURIAN PUTRI QAMARA
07041281823126**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH IDENTITAS NASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN
KELUARNYA TURKI DARI KONVENSI ISTANBUL**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**LURIAN PUTRI QAMARA
07041281823126**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Program Sarjana

Pembimbing I

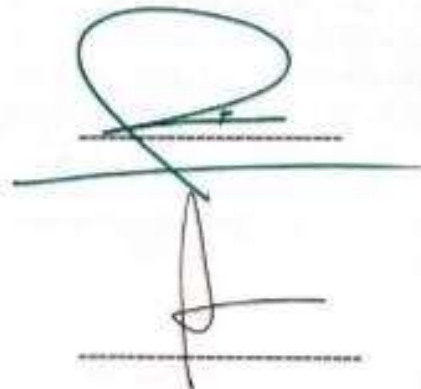
1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP.197705122003121003

Pembimbing II

2. Nurul Aulia, S.IP., M.A

NIP.199312222022032013



**Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,**
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PENGARUH IDENTITAS NASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN
KELUARNYA TURKI DARI KONVENSI ISTANBUL”**

Skripsi
Oleh:
LURIAN PUTRI QAMARA
07041281823126

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 Maret 2024

Pembimbing :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.si
NIP. 197705122003121003
2. Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013

Penguji :

1. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Pd
NIP. 199402132022031010
2. Yuni Permatasari, S.IP., M.HI
NIP. 199706032023212021

Tanda Tangan



Handwritten signatures of the supervisors and examiners, each on a dashed line.

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI



Official stamp of Universitas Sriwijaya and signature of Prof. Dr. Alftrij, M.Si.

Prof. Dr. Alftrij, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional



Handwritten signature of Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lurian Putri Qamara

NIM : 07041281823126

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ **PENGARUH IDENTITAS NASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN KELUARNYA TURKI DARI KONVENSI ISTANBUL**” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuaan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 05 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Lurian Putri Qamara

NIM. 07041281823126

ABSTRAK

Identitas nasional merupakan kesadaran kolektif tentang karakteristik khas suatu bangsa atau negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana identitas nasional suatu negara mampu mempengaruhi pembuatan atau perumusan pada kebijakan luar negerinya, seperti fenomena keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul setelah mengadopsi identitas nasional Neo-Ottomanisme. Pada tahun 2011 Turki menyetujui dan meratifikasi Konvensi Istanbul sebagai sikap serius Turki untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun di tahun 2021 Turki secara resmi mengumumkan penarikan dirinya terhadap Konvensi Istanbul. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik literature review untuk mendalami dan mengeksplorasi makna dari fenomena sosial melalui data yang disajikan dari data yang resmi dan kredibel. Reformulasi identitas nasional Neo-Ottomanisme dikaji dengan teori konstruktivisme aspirasional oleh Anne Clunan, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional suatu bangsa bersifat tidak statis. Terdapat empat indikator berdasarkan konstruktivisme aspirasional dalam menggambarkan identitas nasional Neo-Ottomanisme yaitu, *national self-image* melalui refleksi diri akan kebanggaan pewaris Kekaisaran Ottoman, yang kemudian menjadi strategi elit politik pada *identity management strategy* dalam menciptakan citra diri nasional dengan pemahaman konservatif dan demokrasi dalam implementasi kebijakan domestik dan luar negeri Turki meninggalkan sentimen pro-Barat yang diadopsi pada identitas sebelumnya. Setelah strategi tersebut diimplementasikan akan terciptanya *behaviour orientation (in-groups & out-groups)* pada proses pengambilan keputusan yang berfokus pada persamaan nilai dari AKP dan Erdogan dalam pengaruh gerakan anti-gender. Terakhir adalah historical observation and political aspiration effectivity yang menggambarkan AKP dan Erdogan menggunakan pengamatan masa lalu untuk menghasilkan kebijakan realistik dari kondisi Turki terkini.

Kata Kunci : Identitas Nasional, Konvensi Istanbul, Turki, Kekerasan Terhadap Perempuan

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II

Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP. 199312222022032013

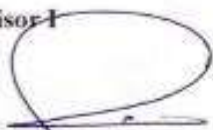


ABSTRACT

National identity is the collective awareness of the distinctive characteristics of a nation or country. The purpose of this study is to investigate how a country's national identity can influence the formulation of its foreign policy, as seen in phenomena such as Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention after adopting the Neo-Ottoman national identity. In 2011, Turkey agreed to and ratified the Istanbul Convention as a serious commitment to combat violence against women and domestic violence. However, in 2021, Turkey officially announced its withdrawal from the Istanbul Convention. Using qualitative descriptive research methods and literature review techniques to delve into and explore the meaning of social phenomena through data presented from official and credible sources. The reformulation of the Neo-Ottoman national identity is examined through Anne Clunan's aspirational constructivism theory, leading to the conclusion that a nation's national identity is not static. There are four indicators based on aspirational constructivism in describing the Neo-Ottoman national identity: national self-image through reflection on the pride of being heirs to the Ottoman Empire, which then becomes a strategy of political elites in identity management strategies in shaping the national self-image with conservative understanding and democracy in implementing domestic and foreign policies, departing from the pro-Western sentiments adopted in the previous identity. After these strategies are implemented, there will be a creation of behavior orientation (in-groups & out-groups) in decision-making processes focusing on the shared values of the AKP and Erdogan in influencing the anti-gender movement. Finally, historical observation and political aspiration effectiveness depict how the AKP and Erdogan use observations of the past to generate realistic policies for Turkey's current conditions.

Keywords: *National Identity, Istanbul Convention, Turkey, Violence Against Women*

Advisor I




Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Advisor II



Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP. 19931222022032013

Approved by,
Head of Department,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmatNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa penulis hanturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat Islam dan pengetahuan hingga saat ini. Sehingga penulis mampu memberikan tulisan yang bermanfaat dengan judul **“PENGARUH IDENTITAS NASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN KELUARNYA TURKI DARI KONVENSI ISTANBUL”** yang ditulis dalam memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang senantiasa telah membantu, memberikan semangat motivasi, serta kritik dan saran dari awal proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat, ridho, dan nikmat sehat maupun karuniaNya dalam langkah hidup penulis.
2. Orang yang penulis sayangi dan hormati, yaitu kedua orang tua penulis yaitu ayah Fery Pramono dan Almh Lusi Marita serta ibu sambungku Ekawati yang telah memberikan motivasi dan selalu memberikan yang terbaik bagi penulis dari kecil hingga dewasa serta selalu menjadi orang tua yang bertanggung jawab.
3. Adik kesayangan penulis yaitu Nabilah (Bella) yang jadi teman penulis dimanapun dan kapanpun.
4. Yai kesayangan penulis yang telah memberikan doa dan petuah bermakna untuk penulis.

5. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. beserta jajaran staf;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. beserta jajaran staf;
7. Rektor Universitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen pembimbing 1 penulis, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Sc yang telah memberikan kritik, bimbingan, serta memperlancar jalan penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Dosen pembimbing 2 penulis, Ibu Nurul Aulia, S.IP., M.A yang telah memberikan saran, bimbingan, dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan ini;
9. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Pd dan Miss Yuni Permatasari, S.IP., M.HI selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan banyak saran dan masukan bermanfaat bagi penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan lebih baik;
10. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing akademik;
11. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah mengajarkan banyak hal, tidak hanya ilmu yang bermanfaat tetapi juga pandangan hidup sebagai bekal penulis untuk melanjutkan kehidupan kedepannya dan pastinya seluruh staf administrasi jurusan yang telah banyak membantu dari awal semester hingga pemberkasan wisuda;
12. Mentor magang Mbak Rini, Ibu Noni, Mas Rizki dan teman – teman di tempat magang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selalu menjadi tempat ternyaman selama penulis melakukan KKHI;
13. Teman – teman kuliah penulis yang sudah banyak membantu selama proses perkuliahan, tanpa mereka penulis tidak sampai ketitik ini, Tresea, Rani, Kintam, Auva, Abel, Asti,

14. Cisyar, Zulkifli, Rapep, Rakha, Sandro, Yosep, dan teman - teman kelas B HI Indralaya 2018;
15. Soulmate penulis, Rohman yang telah membantu dan menemani proses penulisan skripsi ini;
16. Abang dan kakak-kakak di kost nice stay, Kak Indah, Bang Abeng, Kak Bela, Bang Joni, Bang Adit, Bang Sobul, Kak Putri, Kak Edlin, Mbak Astrid Bang Ryan, Pak Hendra dan Ibu Hendra yang telah menemani penulis selama di masa magang selama 4 bulan.
17. Teman – teman yang selalu mendukung penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, Adis, Haldesti, Sharada, Dita, Ayu, dan Bella,;
18. Dan penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang dalam berbagai situasi selama penulisan ini.

Dengan demikian, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang sangat berpengaruh di kehidupan penulis, serta penulis juga memohon maaf jika telah melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja kepada pihak-pihak terkait.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyaknya kekurangan, namun penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang, 20 Mei 2024



Lurian Putri Qamara

NIM.07041281823126

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoris	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2 Kerangka Teori.....	22
2.2.1 Perspektif Konstuktivisme	22
2.2.2 <i>Aspirational Constructivism</i>	23
2.2.3 Reformasi Identitas Nasional Turki (Neo-Ottomanisme)	27
2.3 Alur Pemikiran.....	29
2.4 Argumentasi Utama.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32

3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Definisi Konsep	32
3.2.1 Identitas Nasional	32
3.2.2 Turki	33
3.2.3 Konvensi Istanbul	33
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Unit Analisis	37
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Keabsahan Data	38
3.8 Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	40
4.1 Dinamika Identitas Negara Turki	40
4.1.1 Identitas Nasional Turki Era Kekaisaran Turki Utsmaniah (Ottoman)	40
4.1.2 Identitas Nasional Turki Era Mustafa Kemal Attaturk	43
4.1.3 Identitas Turki Era Recep Tayyip Erdogan	47
4.2 Konvensi Istanbul	52
4.2.1 Sejarah Konvensi Istanbul	52
4.2.2 Tujuan Konvensi Istanbul	58
4.2.3 Isi Pokok Konvensi Istanbul	59
4.2.4. Implementasi Konvensi Istanbul di Negara-Negara Eropa	72
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	76
5.1 <i>National Self-Image</i>	76
5.2 <i>Identity Management Starategy</i>	85
5.3 <i>Behavior Orientation (In-group & Out-group)</i>	93
5.4 <i>History Observation and Political Aspiration Effectivity</i>	106

BAB VI PENUTUP119

6.1 Kesimpulan.....119

6.2 Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peneliti Terdahulu.....	16
Tabel 3.1	Fokus Penelitian.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Implementasi Teoritis.....	26
Gambar 2.2	Alur Pemikiran.....	30
Gambar 5.1	Kontrak Persetujuan Konverensi Istanbul.....	81
Gambar 5.2	Deklarasi Keputusan Keluarnya Turki Dari Konverensi Istanbul.....	141

DAFTAR SINGKATAN

AKP	: <i>Adelet ve Kalkinma Partisi (Justice and Development Party)</i>
CAHVIO	: <i>Ad Hoc Committee for Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of Discrimination Against Women</i>
CHP	: <i>Cumhuriyet Halk Partisi (Republican People's Party)</i>
CoE	: <i>Council of Europe</i>
ESIK	: <i>Esitlik Icin Kadin Platformu (Women's Platform Equality)</i>
FP	: <i>Fazilet Partisi (Virtue Party)</i>
GONGOs	: <i>Government-Organization Non-Govermental Organization</i>
GREVIO	: <i>Groups of Experts on Action Against Violence Women and Domestic Violence</i>
Istanbul Convention	: <i>Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence</i>
KADEM	: <i>Women and Democracy Association</i>
KUHP	: <i>Kitab Undang-Undang Pidana</i>
KUHPerdata	: <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>
LGBT	: <i>Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MENA	: <i>Middle East and North Africa</i>
MNP	: <i>Milli Nizam Partisi (National Order Party)</i>
MSP	: <i>Milli Selamet Partisi (National Salvation Party)</i>
NGO	: <i>Non-Govermental Orgaization</i>
NWP	: <i>National Women's Day</i>
RP	: <i>Refah Partisi (Welfare Party)</i>
SP	: <i>Saadet Partisi (Felicity Party)</i>
TUGVA	: <i>Türkiye Genclik Vakfi (Turkey Youth Foundation)</i>
YRP	: <i>Yeni Refah Partisi (New Welfare Party)</i>
UU	: <i>Undang-Undang</i>

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
TKB : *The Turkish Women's Assocation*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya era Perang Dingin telah mengangkat topik identitas nasional sebagai salah satu perbincangan utama dalam politik internasional. Perbedaan kondisi yang tidak lagi terbagi dalam blok-blok, seperti yang terjadi saat Perang Dingin, menciptakan ketidakjelasan dalam menentukan identitas nasional bagi beberapa negara. Hal ini kemudian memiliki dampak pada aktor-aktor hubungan internasional, terutama negara-negara dalam usaha mereka untuk mengkonsep ulang identitas nasional masing-masing (Hudson, 2007). Dalam kerangka teori Konstruktivisme khususnya dalam konteks identitas nasional, telah menjadi variabel tambahan di antara beberapa variabel utama dalam menganalisis fenomena internasional. Seiring berjalannya waktu, pembentukan identitas nasional dapat memiliki dampak substansial pada perumusan kebijakan luar negeri. Sejumlah akademisi dari masa lalu menyoroti signifikansi identitas nasional terhadap kebijakan luar negeri, dan pandangan ini diperkuat oleh kesepakatan sebagian besar para pengamat kebijakan luar negeri (Lisbeth, 1999).

Kaum konstruktivisme juga memandang bahwa identitas nasional sebagai khayalan komunitas politik (Anderson, 2006). Terdapat berbagai cara dalam menghayalkan sesuatu bangsa, sehingga ada banyak persepsi yang bersaing akan pemahaman bangsa dalam suatu komunitas yang sama (Malinova, 2008 : 41). Untuk itu, keberagaman identitas negara akan berbeda dan saling bersaing dari sejarah masa lalu dan kondisi saat ini yang telah ditafsirkan melalui ideologi yang berbeda. Fenomena akan teori konstruktivisme dalam pemaknaan identitas nasional dapat dilihat seperti identitas negara Turki yang mengalami reformasi dalam membangun identitas negaranya.

Turki mengalami beberapa model identitas yang berbeda dan mengalami persaingan ideologi yang berasal dari masa lalu hingga saat ini yang telah diinterpretasikan melalui perjalanan identitas yang berbeda seperti Ottomanisme, Kemalisme, Westernisme, dan saat ini memiliki identitas nasional sebagai Neo-Ottomanisme (Yavuz, 1998).

Turki dapat diklasifikasikan sebagai negara di wilayah Eurasia, yang terletak diantara Benua Eropa dan Asia. Negara ini cenderung memiliki dualisme identitas nasional yang disebabkan oleh faktor geografis serta dinamika internal yang berasal dari sejarah panjang Turki pasca era kekaisaran Ottoman (Ismailov, 2010). Pada masa keemasan Ottoman, wilayah kekuasaan Turki melibatkan sejumlah besar daerah, mulai dari Balkan, Anatolia, hingga Jazirah Arab. Fenomena ini melahirkan variasi yang substansial dalam masyarakat Turki, mencakup perbedaan agama, suku dan ras. Meskipun demikian, kekaisaran Ottoman tetap mengakui identitas Islam melalui penerapan hukum syariah Islam di dalam wilayah Turki pada masa itu. Selain itu, kekaisaran Ottoman juga menerapkan hukum sekuler bagi kelompok masyarakat non-islam (Toprak, 1999).

Setelah mengalami kekalahan oleh tentara Yunani di Anatolia pada tahun 1922, secara *de facto* Turki mendapati keruntuhan kekaisaran Ottoman dengan munculnya negara baru sebagai Turki modern. Pada tahun 1923, Turki mengalami reformasi pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk (Giannakopoulos, 2003). Ataturk membentuk Republik Turki yang modern dan menghilangkan sistem khilafah yang identik dengan nilai-nilai Islam. Selain itu juga pemerintah Ataturk melakukan redefinisi terhadap identitas nasional Turki, termasuk politik, budaya, dan agama. Politik luar negeri Turki saat itu juga diubah menjadi Eropa sentris yang sebelumnya pada era Ottoman Turki dekat dengan Timur Tengah (Huntington, 1996). Reformasi yang dilakukan oleh Ataturk terjadi secara internal dan eksternal agar cita-cita Turki mampu mengadaptasi modernisasi

dengan waktu yang cepat. Hal ini juga agar meningkatkan perekonomian Turki melalui industrialisasi yang sangat erat hubungannya dengan peradaban Barat (Giridharadas, 2013).

Sejak masa Atatürk hingga tahun 1990an kegiatan luar negeri Turki sangat erat dengan dunia Barat serta sekularisasi, hal ini menimbulkan adanya dualisme identitas Turki. Istilah *White Turks* sebagai identifikasi identitas Eropa pada masyarakat Turki dan *Black Turks* sebagai identifikasi identitas Asia pada masyarakat Turki meskipun masyarakatnya dikuasai agama Islam. Keberadaan identitas Eropa telah menjadi bagian masyarakat Turki, hal ini tidak begitu saja diterima oleh Uni Eropa dalam pengaplikasian keanggotaan Uni Eropa yang diajukan oleh Turki. Paradigma Turki sebagai negara berpenduduk Muslim tetap menjadi faktor utama dalam penolakan Uni Eropa terhadap keanggotaan Turki, disamping faktor-faktor lain seperti perekonomian yang belum mencapai tingkat yang diharapkan dan dominan kecenderungan budaya Turki yang masih dianggap berasal dari wilayah Asia (Giridharadas, 2012).

Terdapat periode singkat yakni ditahun 1996-1997 pada pemerintahan Turki kepada mantan Perdana Menteri Necmettin Erbakan yang memperkenalkan politik Islam di Turki dan menjadi mentor bagi Erdogan. Erbakan mengajarkan kebijakan pro-Barat dan berusaha mendirikan berbagai partai politik Islam untuk mendapat hati para masyarakat Turki. Meskipun sebelumnya pembentukan partai ini selalu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun setelah kematian Erbakan, saat ini partai Islam semakin ditunggu kehadirannya di tengah masyarakat Turki (Zainal, 2016).

Pada pemilihan umum Turki tahun 2002, partai Islam AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*) berhasil meraih kemenangan dengan memenangkan mayoritas suara, mengamankan 2/3 kursi pemerintahan. Posisi Perdana Menteri berhasil dimenangkan oleh Recep Tayyip Erdogan. AKP berhasil mendominasi perolehan suara mencapai 34,2% dari total suara dan mengamankan 363

kursi dari total 550 kursi di Parlemen. Dengan demikian, kemenangan ini memberikan AKP legitimasi untuk membentuk pemerintahan tanpa perlu membentuk koalisi, dengan dukungan sebanyak 80,4% sebagian besar anggota Majelis Nasional (Soekanto, 2012). Kepemimpinan AKP dan Erdogan yang memiliki latar belakang Islam, melaksanakan serangkaian reformasi sejalan dengan beberapa inisiatif yang pernah dilakukan oleh Atatürk. Erdogan bertujuan untuk memulihkan stabilitas Turki dengan mengembalikan beberapa aspek masa kekhalifahan Ottoman tanpa melibatkan pengusiran terhadap etnis tertentu. Bersama AKP, Erdogan merumuskan kebijakan luar negeri Turki dengan pendekatan politik multidimensional, mencakup hubungan luar negeri ke wilayah yang lebih luas dan beragam (Barkey, 2011). Erdogan mengoptimalkan posisi geografis Turki sebagai aktor global dalam politik internasional, yang tidak hanya berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Timur dan Barat (Taghian, 2011).

Di bawah pemeritahan AKP, Turki meninggalkan identitas Kemalis yang dipandang menyerang identitas Turki Ottoman dan Islamisme. Erdogan mengkritik keras para pendiri ideologi Kemalis dan elit politik Kemalis pada masa lalu yang mengabaikan nilai tradisional Turki dan melupakan peradaban Turki Ottoman, dimana Kemalis sangat mendorong Turki ke dalam peradaban Barat (Khamami, 2016). Apresiasi mengenai sejarah masa lalu Kekaisaran Ottoman membawa Erdogan sebagai penggerak Neo-Ottomanisme dalam formulasinya membangun masyarakat Turki yang lebih islami. Pemahaman Neo-Ottomanisme menawarkan kembali pemikiran bagaimana identitas dan hubungan luar negeri Turki mampu menjadi proyek pembangunan yang jauh dari bayang-bayang identitas Kemalis (Yavuz, 2016).

Neo-Ottomanisme telah melaksanakan kepentingan Turki sebagai entitas yang aktif dalam kancah global. Pemerintahan Erdogan berupaya memposisikan Turki sebagai pusat politik dunia dengan memperluas cakupan kekuasaan ke wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagian dari

Kekaisaran Ottoman, seperti negara-negara Balkan, Kaukasus, hingga Timur Tengah. Konsep ini sejalan dengan pernyataan Ahmet Davutoglu sebagai mantan Perdana Menteri Turki yang mengemukakan:

“Turkey, which has been seen as the inheritor of seven hundred years of Ottoman history, is still seen as a political center by the people in its close territorial basin.” Aset yang Ottoman tinggalkan memaksa Turki untuk bersikap proaktif dan siap untuk menjalankan misi-misi regionalnya. Sehingga pemerintahan Turki melegalisasi “julukan sejarah” dari sejarah Ottoman terdahulu. Davutoglu juga menambahkan *“This is nothing but an expression of the fact that history exceeds the wills limited to particular periods and exerts its authority over daily politics”* (Davutoglu, 2014).

Pada awal masa pemerintahannya di tahun 2003, Erdogan bertindak cermat dalam menyatakan kebijakan domestik dan luar negeri yang identik dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya agar menekan kecemasan dari kelompok sekular dalam negeri dan pihak-pihak eksternal. Namun pemerintah Turki justru memperoleh proses signifikansi demokratisasi yang baik pada sistem pemerintahan politik dengan pihak internal dan eksternal. Setelah dengan berkuasanya AKP dan Erdogan yang memiliki latar belakang Islam yang kuat, mulailah terjadi pergeseran ideologi pada kebijakan luar negeri Turki. Neo-Ottomanisme menjadi identitas Turki untuk mengembalikan pembangunan bangsa Turki berdasarkan sejarah warisan Ottoman dan menjadi elemen penting bagi konstitusi negara Turki (Berkes, 1998). Sehingga menyebabkan redefinisi dalam proses identitas nasional Turki. Pemerintahan Turki yang dikuasai oleh Partai AKP bercita-cita akan menampilkan citra dirinya sebagai penyeimbangan bagi Islamisme, demokrasi, dan sekularisme di tengah signifikannya pertumbuhan ekonomi dan akan mengedepankan *soft power*. Selama

penjabatan Erdogan pada dekade pertama, Turki menjaga hubungan baik dengan Barat pada kebijakan luar negerinya meskipun memiliki karakter Neo-Ottomanisme (Yavuz, 2020 : 66).

Dengan pembawaan identitas Neo-Ottomanisme juga membuktikan bahwa identitas ini merupakan sikap pro-Barat dan bukan anti-Barat di dalam kebijakan luar negeri Turki. Erdogan dan AKP menghindari retorika anti-Barat dan menyatakan aspirasi mereka untuk menjadi anggota Uni Eropa. Hal ini selaras dengan keikutsertaan Turki pada Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul atau *The Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence* adalah seperangkat instrumen pertama yang mengikat secara hukum Eropa untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga. Konvensi ini ditandatangani oleh tiga belas negara dan Turki menjadi negara pertama yang bergabung dalam Konvensi Istanbul dengan menandatangani Konvensi Istanbul pada 11 Mei 2011 dan meratifikasinya pada tanggal 12 Februari 2012. Fokus konvensi ini memberikan serangkaian tindakan komprehensif untuk menangani semua bentuk kekerasan kepada perempuan dan rumah tangga. Dinyatakan dalam pembukaan Konvensi Istanbul bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat “struktural” dan menjadi hambatan utama dalam pencapaian kesetaraan diantara perempuan dan laki-laki (Szyszlak, 2022 : 74).

Konvensi Istanbul merupakan hasil dari *Ad Hoc Committee for Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence* (CHAVIO) yang dibentuk pada Desember 2008, dimana dalam keanggotaannya terdiri dari perwakilan pemerintahan dari 47 negara Anggota Majelis Eropa, Organisasi Internasional seperti Uni Eropa dan PBB serta *Non-Governmental Organization* (NGO) (Niemi, 2021). Sebelumnya, Konvensi Istanbul berangkat dari suatu permasalahan yang terjadi dalam *The European Court of Human Rights* atau pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Sekretariat Jenderal Dewan Eropa melihat bahwa tidak memadainya perlindungan

dan pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan yang tidak hanya terjadi pada negara Turki tetapi juga negara-negara anggota Dewan Eropa lainnya. Negara Turki merupakan salah satu negara yang mengalami angka peningkatan terhadap kasus pembunuhan terhadap perempuan. Terhitung sejak tahun 2011 terdapat kasus pembunuhan terhadap perempuan sebanyak 127 kasus, di tahun 2012 sebanyak 143 kasus, di tahun 2013 mengalami 229 kasus, dan di tahun 2014 terus mengalami peningkatan sebanyak 289 kasus (We Will Stop Femicide Platform, 2020). Sehingga, penciptaan Konvensi Istanbul diperlukan untuk menyelaraskan undang-undang dalam memastikan tingkat perlindungan yang sama bagi perempuan di berbagai negara (Council of Europe Portal, 2021). Erdogan saat itu yang menjabat sebagai Perdana Menteri membuktikan bahwa pemerintah Turki sangat menyadari pentingnya partisipasi Turki dalam Konvensi Istanbul. Tindakan akan bergabungnya Turki pada konvensi Istanbul saat itu juga sejalan dengan visi *soft power* Turki dengan meningkatkan pengaruh Turki dalam keputusan ini sebagaimana penggunaan *soft power* menjadi kebijakan dalam dan luar negeri yang sesuai dengan yang dipromosikan (Cerami, 2013).

Konvensi Istanbul telah menimbulkan dampak yang besar di Eropa karena memberikan dukungan dan pemantauan pada sistem implementasinya. Namun setelah satu dekade dibentuk, Konvensi Istanbul mengalami banyak perdebatan diantara kelompok konservatif dan para aktivis perempuan khususnya pada wilayah Eropa Tengah dan Timur. Konvensi ini dianggap sebagai ancaman bagi nilai-nilai keluarga tradisional serta menjadi sasaran kritikan para kaum nasionalis dan konservatif. Turki merupakan salah satu negara yang mengalami peristiwa ini, dan pemerintah Turki sangat antusias dalam menyatakan penentangan akan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi Istanbul dalam beberapa tahun terakhir (Stoyanova, 2020).

Pada pelaksanaan pemilu ke-3 yang dilaksanakan tahun 2011, kemenangan partai AKP meningkatkan rasa kepercayaan diri di dalam kekuasaan politik. Terdapat beberapa perubahan

penting yang terjadi dalam hubungan internal dan eksternal Turki selama AKP berkuasa. AKP semakin ketat dalam peningkatan ekonomi, layanan sipil, peradilan, serta media. Sementara itu, minat pemerintahan dalam menyelesaikan demokratisasi internal semakin berkurang. Di saat yang sama terjadinya fenomena “*Arab Springs*” menjadi tantangan baru bagi perkembangan *soft power* Turki yang sedang dijalankan. Banyaknya keterlibatan Turki dalam dinamika internal negara-negara di Mediterania dan Timur Tengah melemahkan peran Turki sebagai model harmonisasi Islam-demokratik (Önis, 2012).

Pada tanggal 10 Agustus 2014, Erdogan secara resmi memenangkan pemilihan Presiden yang sebelumnya telah menjabat sebagai Perdana Menteri untuk mengubah sistem demokrasi parlementer menjadi sistem presidensial. Turki menjadi negara demokrasi yang tidak liberal dimana lembaga-lembaga di dalam Turki dipimpin oleh mayoritas konservatif. Adanya kudeta tahun 2016 menjadikan Erdogan mengambil alih besar dalam sektor ekonomi, birokrasi, serta media. Ditambah terjadinya referendum pada tahun 2017 dan pemilihan presiden pada tahun 2018 membawa sistem baru di Turki yang menyatakan bahwa “Kepala Negara memperoleh kekuasaan hampir tidak terbatas dan hilangnya jabatan Perdana Menteri”. Sejak saat itu Erdogan pun menetapkan agenda yang semakin otoriter, konservatif serta islami. Hingga keputusan dalam kebijakan luar negeri menjadi semakin agresif (Önis, 2015).

Dengan adanya serangkaian skenario tersebut, Turki memiliki pertimbangan untuk keluar dari Konvensi Istanbul dan menjadi strategi Erdogan dalam mendapatkan dukungan dari para kelompok konservatif. Persamaan akan identitas yang dimiliki oleh Erdogan dan kelompok-kelompok konservatif ini menjadi faktor kuat dalam tindakan Turki keluar dari Konvensi Istanbul karena sejalan dengan pemikiran pemerintah yang menganggap bahwa konvensi ini telah menjadi elemen pemecah belah masyarakat Turki. Isi kandungan dalam Konvensi Istanbul juga sering

menjadi perdebatan dan dituduh mempromosikan budaya LGBT dan merusak nilai-nilai keluarga tradisional Turki dan juga konvensi ini mengacu pada kontroversi pemaknaan akan konsep “gender” (Boulton, 2021).

Pada tanggal 22 Maret 2021, setelah sepuluh tahun berlalu sejak Turki meratifikasi Konvensi Istanbul, Direktorat Komunikasi Turki mengumumkan penarikan diri negara Turki, menyertakan alasan resmi akan keputusan tersebut. Dalam pernyataan resmi tersebut menyatakan bahwa “Konvensi Istanbul yang aslinya untuk mempromosikan hak-hak perempuan, dibajak oleh sekelompok orang yang menormalkan homoseksualistas, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial Turki. Sehingga, Turki memutuskan untuk mengeluarkan diri”. Penarikan diri ini telah mendapatkan persetujuan dari kabinet No.2012/2816 pada 10 Februari 2012, sesuai dengan Pasal 3 dekrit Presiden No.9, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk melaksanakan, menghentikan pelaksanaan, mengesahkan, atau mengakhiri perjanjian internasional melalui keputusan Presiden (Cantekin, 2021).

Fenomena dan penjelasan atas penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul telah diteliti oleh dua akademisi sebelumnya. Yang pertama, peneliti Rania Nabilla Putri dengan judul penelitian “Latar Belakang Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul Tahun 2021” yang diteliti di tahun 2022 (Putri, 2022). Jenis penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul berdasarkan teori *Decision Making Theory* dari Richard Synder, H.W. Bruck dan Burton Sapin. Teori tersebut menjelaskan bagaimana setting internal dan eksternal mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara yang selanjutnya dapat diproyeksikan bagi seorang pembuat kebijakan untuk merespon dan memutuskan tindakan sesuai dengan faktor dan kondisi yang terjadi. Analisis proses pengambilan keputusan tersebut menggunakan *social structure & behaviour* sebagai pelengkap dari kedua faktor internal serta eksternal tersebut (Snyder, 2002).

Pada setting internal, peneliti menggunakan dua indikator yakni *society dan human environment* dalam menjelaskan terjadinya penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul. Dijelaskan bahwa *society* yang berasal dari partisipasi masyarakat cukup memberikan pengaruh bagi perubahan kebijakan Pemerintah Turki. Selanjutnya untuk *human environment* memuat dua faktor yakni budaya dan populasi dalam merumuskan suatu kebijakan. Manusia menjadi aktor yang mempengaruhi kebijakan, seperti masyarakat atau non pemerintah. Selanjutnya budaya yang dimaksud adalah masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan konservatif. Untuk *social structure and behaviour* dapat dikategorikan sebagai setting internal, yang mana terdapat pada *major common value orientation* menjelaskan nilai Islamis dan konservatif dalam sebagian masyarakat Turki mempengaruhi perumusan kebijakan. Begitu pula dengan *major institutional pattern* dimana partai politik AKP menganut pada nilai yang sama. Sedangkan untuk *relevant social process* berkaitan dengan bagaimana visualisasi dari opini publik mengenai Presiden Erdogan dalam peran perempuan, kesetaraan gender dan nilai-nilai politik anti gender serta diskriminasi terhadap gerakan feminisme.

Untuk setting eksternal menjelaskan bagaimana kondisi dari luar batas teritorial suatu negara berdasarkan aksi-reaksi, tindakan, budaya, serta letak geografis negara tersebut. Di dalam setting eksternal ini terdapat dua faktor dalam menjelaskan alasan Turki keluar dari Konvensi Istanbul. Pertama berdasarkan *other societies* dimana terdapat pandangan berbeda dari negara Uni Eropa dalam memandang LGBT dan peranan perempuan, kemudian hal ini mempengaruhi keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul. Selanjutnya untuk *other cultures* dapat diartikan bagaimana perbedaan budaya diantara satu dan lainnya mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Kedua, peneliti Raisha Violina dengan judul penelitian “Kebijakan Penarikan Diri Turki Dari Konvensi Istanbul Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan” yang diteliti di tahun 2022 (Violina, 2022). Jenis penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan menggunakan teori kebijakan luar negeri dengan konsep *Foreign Policy Changes* yang dikemukakan oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis. Terdapat tiga parameter dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri yakni *domestic structural parameters*, *international structural parameters*, dan *domestic-international conjunctural parameter* (Blavoukos, 2014).

Domestic structural parameters adalah pengaturan pada lembaga politik dalam proses pengambilan kebijakan melalui kelompok advokasi ataupun individu dalam menentukan kebijakan luar negeri. Sebagian besar input kebijakan berasal dari individu (unit otoritas keputusan) yang terdiri dari tiga unit. Pertama, individu seperti presiden, raja, serta otoritarianisme seorang pemimpin. Kedua, *single group* yang berpengaruh dalam kebijakan negara seperti kudeta militer. Ketiga, aktor otonom yang memiliki hak *veto* dalam sebuah kebijakan, seperti koalisi partai politik. Kelompok advokasi juga memiliki pengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Kelompok pertama yaitu *political culture*, adalah kelompok yang memberikan pengaruh pada pengambil kebijakan dengan menjadikan identitas bersama terkait instrumen kebijakan luar negeri. Kedua, *socio-economic group* adalah kelompok yang mampu menggiring opini publik untuk memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Ketiga *policy entrepreneurs* adalah tokoh yang memiliki kapabilitas khusus yang mampu memberikan pengaruh perubahan dalam kebijakan luar negeri.

International structural parameters mengacu pada peranan negara dalam sistem internasional. Terdapat dua peranan negara dalam sistem internasional yang mampu mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Pertama interaksi antar negeri yang dipandang sebagai rival. Kedua, interaksi negara dengan negara – negara lainnya untuk memperkuat hubungan antar negara. Ketiga, partisipasi negara dalam organisasi nasional yang pada dasarnya terbentuk norma dan spesifikasi tertentu dan negara mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Domestic-international conjunctural parameters melihat perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Jika dilihat dari sisi domestik, seperti pergantian kepemimpinan disebabkan oleh kematian, kudeta militer, dan guncangan politik atau keamanan. Selanjutnya jika dilihat dari sisi internasional, perubahan kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh fenomena tidak terduga yang disebabkan oleh krisis global atau krisis keamanan global. Hal ini mampu mendorong perubahan arah politik suatu negara sebagai respon atas permasalahan tersebut.

Dengan penjelasan sebelumnya, berdasarkan keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul yang akan peneliti analisis berbeda dengan dua peneliti sebelumnya. Peneliti ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul menggunakan perspektif konstruktivisme dengan teori identitas nasional menurut Anne Clunan yang dirumuskan dengan judul “Pengaruh Identitas Nasional Turki terhadap Keputusan Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana identitas nasional Turki mempengaruhi keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis yang berjudul “Pengaruh Identitas Nasional Turki Terhadap Keputusan Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul” adalah menganalisis bagaimana pengaruh identitas nasional mampu menjadi penyebab keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta sumbangsi pemikiran kepada para akademisi di bidang Ilmu Hubungan Internasional perihal perpektif konstruktivisme dan teori identitas nasional negara Turki dalam keputusannya untuk keluar dari Konvensi Istanbul.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa atau peneliti lainnya untuk mengkaji lebih dalam terhadap fenomena yang terjadi dalam reformasi yang dilakukan oleh Turki dalam menentukan identitas nasionalnya, sehingga menjadi penyebab atas keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi jurusan, karya tulis ini dapat menjadi dokumen keilmiahan yang bisa dimanfaatkan bagi penulis lainnya yang memiliki kesamaan pandangan penelitian sehingga mampu menjadi penggambaran pendekatan teori dalam pada isu atau permasalahan yang berkaitan.
- b. Bagi penulis, sebagai sebuah standar pemahaman bagi penulis dalam menguasai teori yang telah dipelajari selama melewati pembelajaran dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional

- c. Bagi masyarakat, sebagai edukasi bagi para pembaca yang meneliti karya tulisan ini sehingga membantu dalam proses pemahaman pada pengaruh identitas nasional khususnya negara Turki terhadap keputasan keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, D. G. (2009). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 1st Meeting* (p. 37). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Affairs, D. G. (2009). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 2nd Meeting* (p. 38). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Affairs, D. G. (2009). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 3rd Meeting* (p. 39). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Affairs, D. G. (2010). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 4th Meeting* (p. 44). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Affairs, D. G. (2010). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 5th Meeting* (p. 49). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Affairs, D. G. (2010). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 6th Meeting* (p. 52). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Affairs, D. G. (2010). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 7th Meeting* (p. 52). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Affairs, D. G. (2010). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 8th Meeting* (p. 39). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Affairs, D. G. (2011). Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO). *Report of The 9th Meeting* (p. 39). Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs.
- Alfian, M. A. (2011). *Militer dan politik di Turki : dinamika politik Pasca-AKP hingga gagalnya kudeta.*

- Alpan, B. (2021). *Europeanization and EU–Turkey Relations: Three Domains, Four Periods*. Palgrave Macmillan.
- Amin, S. M. (2016). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Revised). Verso.
- Aral, B. (2019). “The World Is Bigger than Five”: A Salutary Manifesto of Turkey’s New International Outlook. *Insight Turkey*, 21(4).
- Arat, Z. F. K. (2020). *Women’s Struggle in Turkey and a New Transnational Declaration*. <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/womens-struggle-turkey-and-new-transnational-declaration>
- Aydın-Düzgüt, S. , and K. A. (2016). Encounters with Europe in an Era of Domestic and International Turmoil: Is Turkey a De-Europeanising Candidate Country? In Special Issue: Is Turkey De-Europeanising? Encounters with Europe in a Candidate Country. *South European Society and Politics* , 21(1).
- Barkey, H. J. (2011). Turkish Foreign Policy in the Middle East. *CERI Strategy Papers*.
- Baykal, A. (2010). Where Are Turkey’s New International Relations Taking it? *International Affairs and Defence Section*.
- Berkes, N. (1998). *The Development of Secularism in Turkey*. McGill University Press.
- Blavoukos, S. and B. D. (2014). Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Synthetic Approach. *Cooperation and Conflict* , 49(4).
- Bodur Ün, M. (2021). Europeanization and De-Europeanization of Turkey’s Gender Equality Policy: The Case of the Istanbul Convention. *Journal of Common Market Studies*.
- Bohuler, A. (2019). Muhalefetin yeni aracı: Kadına yönelik şiddeti savunmak.... *Yenişafak*. <https://www.yenisafak.com/yazarlar/ayse-bohurler/muhalefetin-yeni-araci-kadina-yonelik-siddeti-savunmak-2052113>
- Boskovic, A. M. J. P. (2019). Analysis of Practical Application of the Law on Prevention of Domestic Violence With A View on Applying Urgent Measures. *NBP. Nauka, Bezbednost, Policija*, 24(1).
- Boulton, L. (2021, March 25). Erdogan Sacrifices Women’s Protection in Appeal to Conservatives. *Financial Times*.
- Bozdaglioglu, Y. (2003). *Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Approach (International Relations Series)* (1st Edition). Routledge.
- Bozdaglioglu, Y. (2008). Modernity, Identity, and Turkey’s Foreign Policy . *Insight Turkey*.
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J.

- (2005). *Theories of International Relations, Third edition* (Third Edition). PALGRAVE MACMILLAN.
- Burek, W. (2020). Reservations and Declarations under the Istanbul Convention. *International Law and Violence Against Women. Europe and the Istanbul Convention*.
- Burek, W. (2022). Reservations to the Istanbul Convention and the Role of GREVIO: A Call for New Approach. *Human Rights Law Review* , 22.
- Buyuk, H. F. (2020). *Istanbul Convention's Fate Splits Turkish President's Supporters*.
- Buzan, B. (1995). *The Level Analysis Problem in International Relations Reconsidered*. Cambridge: Polity Press.
- Cantekin, K. (2021, July 26). Turkey: Council of State Upholds President's Decision to Withdraw Turkey from Istanbul Convention. *Library of Congress*.
- CEDAW. (2016). *Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of Turkey*.
- Cerami, C. (2013). Rethinking Turkey's Soft Power in the Arab World: Islam, Secularism, and Democracy. *Journal of Levantine Studies*, 3(2).
- Cerami, C. (2021). Turkey, Europe and Women's Rights: The Controversial Debate on Istanbul Convention. *Nuovi Autoritaismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, 2(3).
- Chittick, W. C. (2008). *Sufism : A Beginner's Guide*. Oneworld Publications.
- Clunan, A. L. (2009). *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity and National Interest*. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University press.
- Clunan, A. L. (2009). *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity, and Security Interest* . Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Communications, D. o. (2021). *Directorate of Communications Altun: "Our Government Will Work With All Its Strength To End Violence Against Women And Further Reinforce Women's Place In Social Space*. The Republic of Turkiye Directorate of Communications.
- Communications, D. o. (2021). *Statement Regarding Turkiye's Withdrawal From The Istanbul Convention*. The Republic of Turkiye Directorate of Communications.
- Council of Europe. (2011). *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence*. <https://rm.coe.int/168046031c>
- Council of Europe. (2021). *The Istanbul Convention-A Powerful Tool To End Gender-Based: Violence A handbook for parliamentarians on the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence Council of Europe*.
- Council of Europe Portal. (2021). *Historical Background*.

- Council of Europe Portal. (2023). GREVIO elects its new President and two Vice-Presidents. *Action Against Violence Against Women and Domestic Violence Istanbul Convention*. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-elects-its-new-president-and-two-vice-presidents>
- Czajka, A. (2015). Europe Beyond Universalism and Particularism. *Contemporary Political Theory*.
- Daily News. (2011a). Erdogan: Turkey Has Vigor the EU Needs Badly. *Newsweek Digital*.
- Daily News. (2011b). Erdoğan Urges Women to Participate in Politics. *Hurriyet Daily News*.
- Daily News. (2015). If EU opposes Islamophobia, it must accept Turkey as member: Erdoğan. *Hurriyet Daily News*. <https://www.hurriyetdailynews.com/if-eu-opposes-islamophobia-it-must-accept-turkey-as-member-erdogan-77379>
- Daily News. (2016). Erdoğan praises family, traditional values on International Women's Day. *Hurriyet Daily News*.
- Daily News. (2021). Turkish gov't places importance on integrity of family: Erdoğan. *Hurriyet Daily News*.
- Darakchi, S. (2019). The Western Feminists Want to Make us Gay: Nationalism, Heteronormativity, and Violence Against Women in Bulgaria in Times of Anti Gender Movement. *Sexuality & Culture*.
- Davutoglu, A. (2014). *Stratejik Derinlik* (Turkish Edition). Kure Yayinlari.
- Djuyandi, Y., Rizkiawan, S., & Perdana, A. J. (2021). Kebangkitan Turki Sebagai Kekuatan Menegah Kawasan dan Pandangannya Terhadap Negara-Negara Uni-Eropa dan Negara di Sekitarnya. *Jurnal Analisis Sosial Politik Vol. 5 No.1*, 83.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. PT Revka Petra Media.
- Duvar English. (2020). Islamist Platform to No Longer Submit Advisory Report to Gov't on Istanbul Convention Amid Public Reaction. *AND Journalism and Publishing*.
- Duvar English. (2021). Istanbul; Convention Did Not Bring Respect for Women's Rights: Erdogan. *Duvar.English*. <https://www.duvarenglish.com/istanbul-convention-did-not-bring-respect-for-womens-rights-erdogan-news-57089>
- Elmas, T., Overdorf, R., & Aberer, K. (2021). Tactical Reframing of Online Disinformation Campaigns Against The Istanbul Convention. *Social and Information Networks* .
- EŞİK. (2020). *Press Realese on The 2020 Declaration of Women's Rights*. Istanbul: Esitlik Icin Kadin Platformu
- .EŞİK. (2020). *Women's Platform for Equality (English)*. Istanbul: Esitlik Icin Kadin

Platformu.

EŞİK. (2021). *Explanations*.

<https://esikplatform.net/?fbclid=IwAR3vMbZqYrvaZO8Ls0Bc7W0f3M71aiJUEJErUpQZw8cnFfBKkxwCLxPRUWY#>

Europe, C. O. (2011). *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence*. Istanbul: Council of Europe Treaty Series No. 210.

Europe, C. o. (2011). *Explanatory Reports to the Council of Europe Convention on the Counterfeiting of Medical Products and Similar Crimes Involving Threats to Public Health*. Moskow: Council of Europe Treaty Series No. 211.

European Commission. (n.d.). *Türkiye*. Retrieved May 8, 2024, from

<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/turkey/>

Evin, Ahmet. , K. K. (2010). *Getting to ZERO: Turkey, Its Neighbors and the West*.

Fauzan, E. H. & S. A. M. (2022). Lahirnya Tiga Kerajaan Besar Islam Pada Abad Pertengahan (1250-1800 M). *Jurnal El Tarikh*, 3(1).

Fradkin, H. and L. L. (2013). Erdogan's Grand Vision: Rise and Decline. *World Affairs Institute*, 175(6).

Giannakopoulos, G. (2003). 5 Fakta Kekaisaran Ottoman yang Perlu Kamu Ketahui. *The Conversation*.

Giridharadas, A. (2012, November 30). In Turkey, Forging a New Identity. *The New York Times*.

Giridharadas, A. (2013). History of Turkey and European Union. *DigitalOcean* .

Graff, A., & Korolczuk, E. (2022). *Anti-Gender Politics in the Populist Moment*. Taylor & Francis.

Grans, L. (2018). The Istanbul Convention and the Positive Obligation to Prevent Violence. *Human Rights Law Review*, 18(1).

Gul, M. (2020). *Turkish Islamist Party's Twisted Review of the Istanbul Convention*.

Gurmai, Z. (2019). *The Istanbul Convention on violence against women: achievements and challenges*.

Huda, F. M. (2023). *Mekanisme Amandemen Konstitusi di Republik Turki*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hudson, M. V. (2007). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Rowman & Littlefield Pub.

Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. NY : Simon & Schuster.

- Hypš, S. (2023). Implementation of the Istanbul Convention into the National Criminal Legislation in Poland. *Review of European and Comparative Law*, 55(4).
- Ismailov, E. & P. V. (2010). *Rethinking Central Eurasia*. John Hopkin University.
- Jackson, R. & S. G. (2013). *Introduction to International Relations Theories and Approaches* (Fifth Edition). Oxford University Express.
- John, T. (2016). Turkey's Erdogan Says 'A Woman Is Above All a Mother.' *TIME*.
- Jordan, J., & Azzahra, S. (2023). Construction of Greatness in Foreign Policy: Neo-Ottomanism in Turkey and Eurasianism in Russia. *Global : Jurnal Politik Internasional*, 6.
- Jordan, J., & Azzahra, S. (2023). Constructions of Greatness in Foreign Policy: Neo-Ottomanism in Turkiye and Eurasianism in Russia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 13.
- Karakas, C. (2007). *Turkey: Islam and Laicism Between The Interests Of State, Politics, and Society*.
- Khamami, A. R. (2016). Erdogan Versus Gulen: Perebutan Pengaruh antara Islam Politik Post-Islamis dengan Islam Kultural Apolitis. *Al-Tahrir*, 16(2).
- Krizsan, A. & L. E. (2013). The quality of gender equality policies: A discursive approach. *European Journal of Women's Studies*, 20(1).
- Lisbeth, A. (1999). Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy. *Working Paper 99 (8)*.
- Lombardi, B. (2012). Turkey & Israel: Brinkmanship & The Grand Strategy Of The Erdogan Government. *The Levantine Review*, 1(1).
- Malinova, O. (2008). Creating Meaning and Traps: Competing Interpretations of the Idea of Nation in the Debate of Russian Slavophiles and Westernisers in the 1840s. *European Review of History: Revue Europeenne d'Histoire*, 15(1).
- Meleog, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. remaja Rosdakarya.
- Merdović, B., Bjelajac, Ž., & Počuča, M. (2022). Trends in the Implementation of the Istanbul Convention. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 10(2), 207–217. <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2022-10-2-207-217>
- Meyersfeld, B. (2009). Opuz v Turkey: Confirming the State Obligation to Combat Domestic Violence. *European Human Rights Law Review*, 5.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughni, Dr. S. A. (1997). *Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki*. Logos Wacana Ilmu.
- Munzir, M. et all. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Usmani: Analisis Kemajuan dan

- Kemunduran dan Penyebab Kehancuran Turki Usmani. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*.
- Muvid, M. B. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Utsmani dan Kemajuannya Bagi Dunia Islam. *E-Journal UINFAS Bengkulu*, 20(2).
- News, D. (2011). *Erdogan Urges Women to Participate in Politics*. Hurriyet Daily News.
- News, D. (2011). *Erdogan: Turkey Has Vigor The EU Needs Badly*. Newsweek Digital.
- News, D. (2020). *Ruling AKP Says It's Open to Hear Views Associations on Istanbul Convention*. Ankara: Hurriyet Daily News.
- News, D. (2020). *Turkey May Consider Withdrawing From Istanbul Convention: AKP Official*. Ankara: Hurriyet Daily News.
- Niemi, Johanna. , P. L. & S. V. (2021). *International Law and Violence Againsts Women: Europe and The Istanbul Convention*. Routledge.
- Novianti, F. A. (2018). Pengaruh Agama Islam dan Identitas Turki dalam Menghambat Perluasan Uni Eropa. *Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 3 , 97-98.
- Novianti, F. A. (2018). Pengaruh Agama Islam dan Identitas Turki dalam Menghambat Perluasan Uni Eropa . *Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 3, 98.
- Odatv. (2021). *İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında bakın nasıl kabul edilmişti: Hepiniz oradaydınız*. <https://www.odatv.com/siyaset/istanbul-sozlesmesi-2011-yilinda-bakin-nasil-kabul-edilmisti-hepiniz-oradaydiniz-204075>
- Okyar, O. (2008). *Attaturk's Quest for Modernism*. Westview Press.
- Önis, Z. (2012). Turkey and the Arab Spring: Between Ethics and Self-Interest. *SSRN Electronic Journal* .
- Önis, Z. (2015). Monopolising the Centre: The AKP and the Uncertain Path of Turkish Democracy. *The International Spectator*, 50(2).
- Precidency of The Republic of Turkey Directorate of Communications. (2021). *We Look to the Future With Confidence Thanks to Our Strong Family Structure*.
- Precidency of The Republic of Türkiye. (2013). *Mustafa Kemal Attaturk, Precidency of The Republic of Turkey*. <https://www.tccb.gov.tr/en/communication/>
- Putri, R. N. (2022). *Latar Belakang Kehuarnya Turki dari Konvensi Istanbul Tahun 2021*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- Republic of Turkiye Ministry of Foreign Affairs. (2011). *Address by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey on the Occasion of Handover of the Presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe, 11 May 2011, İstanbul*. https://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-affairs-of-

- the-republic-of-turkey-on-the-occasion-of-handover-of-the-presidency-of-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe_-11-may-2011_-istanbul.en.mfa
- Resmi Gazete. (1934). *Law N No. 2599 amending articles 10 and 11 of the Constitution*], 5 December 1934.
- Rijal, M. F. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Sahinoglu, B. (2024). The Ratification of The Istanbul Convention by The European Union and Its Effect on Candidate States: Specific Reference to Turkey. *Anakara Barosu Dergisi*, 82(2).
- Saz, G. (2011). The Political Implications of the European Integration of Turkey: Political Scenarios and Major Stumbling Blocks. *European Journal of Social Sciences*, 20(1)
- Seker, B., & Sonmezocak, E. B. (2021). Withdrawal from the Istanbul Convention: War on Gender Equality in Turkey. *A Policy Brief Series from Freedom House*, 2.
- SETA. (2009). *Unofficial transcript of foreign minister Ahmet Davutoglus speech, Principles of Turkish foreign policy*.
- Snyder, R. C. , H. W. B. & B. S. (2002). *Foreign Policy Decision Making Theory (Revisited)*. Palgrave Macmillan.
- Soekanto, S. S. (2012). *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Indonesia 1999-2009 Dan Adelet Ve Kalkinma (AKP) Di Turki 2002-2007: Studi Perbandingan*. Program Pascasarjana Ilmu Politik.
- Spindler, M. (2013). *International Relations. A Self-Study Guide to Theory*.
- Stoyanova, Vladislava. , N. J. & P. L. (2020). *The Istanbul Convention as a Response to Violence against Women in Europe* (1st Edition). Routledge.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Susko, D. (2009). *Speech of Ahmet Davutoglu at the opening ceremony of the conference "Ottoman legacy and Balkan Muslim communities today."* International University of Sarajevo.
- Szyszlak, E. (2022). Turkey's Presence in the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence in the Context of Turkey's Soft Power. *Historia i Polityka*, 40(47).
- Tabrani, Z. (2016). Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani). *Jurnal Edukasi*, 2(2).
- Taghian, S. (2011). *Erdogan: Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*. Pustaka Al-Kausar.

- Taspinar, Ö. (2008). Turkey's Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Kemalism. *Carnegie Papers*.
- Tekeli, S. (2010). The Turkish Women's Movement: A Brief History of Success. *Quaderns de La Mediterrània*, 14.
- Thohir, A. (2004). *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Cetakan I). PT Raja Grafindo Persada.
- Toprak, B. (1999). *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*. Tiara Wacana.
- Un, M. B., & Arikan, H. (2021). Europeanization and De-Europeanization of Turkey's Gender Equality Policy: The Case of Istanbul Convention. *Journal of Common Market Studies*, 60(4).
- United Nations. (1987). *Status of Treaties*.
- Violina, R. (2022). *Kebijakan Penarikan Diri Turki Dari Konvensi Istanbul Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan*. Universitas Andalas.
- Viotti, P. R. & K. M. V. (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, Ed.2. Macmillan Publishing Company.
- Vollmer, A. (2022). The Istanbul Convention: A Framework in Crisis? *German Marshall Fund*. <https://www.gmfus.org/news/istanbul-convention-framework-crisis>
- Waxman, D. (1998). The Crisis of Identity in Post-Kemalist Turkey: Domestic Discord and Foreign Policy. *London: Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism*.
- Waxman, D. (2004). Hegemony Lost: The Crises of National Identity in Israel and Turkey. *Paper Presented at the Annual Meeting of the International Studies Association*.
- We Will Stop Femicide Platform. (2020). *We Will Stop Femicide Platform: We Are Learning, Expalining and Extending the Struggle*.
- Wendt, A. (1994). Collective Identity Formation and the International State. *American Political Science Review*, 88(2), 384–396. <https://doi.org/10.2307/2944711>
- World Economic Forum. (2017). *The Global Gender Gap Report*.
- Yavuz, M. H. (1998). Turkish Identity and Foreign Policy in Flux: The Rise of Neo-Ottomanism. *Critique: Journal for Critical Studies of the Middle East*, 7(12).
- Yavuz, M. H. (2003). *Islamic Political Identity in Turkey*. Oxford University Press.
- Yavuz, M. H. (2016). Social and Intellectual Origins of Neo-Ottomanism: Searching for a Post-Nation Vision. *Die Welt Des Islams* .
- Yavuz, M. H. (2020). *Nostalgia For The Empire: The Politics of Neo-Ottomanism*. Oxford University Press.
- Yavuz, M. H. (2020). *Nostalgia For The Empire: The Politics of Neo-Ottomanism*. Oxford

University Press.

Yilmaz, Z. (2015). Dişil Dindarlık İslamcı Kadın Hareketinin Dönüşümü. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi* , 70(3).

Zainal, N. A. (2016). Analisi Tentang Dekemalisasi di Turki Pasca Atatürk. *Jurnal Politik Profetik Vol. 04 No. 1*.

Zainal, N. A. (2016). Analisi Tentang Dekemalisasi di Turki Pasca Atatürk. *Jurnal Politik Profetik Vol. 04 No. 1*, 18.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* . Yayasan Obor Indonesia.

Zencir, V. (2021). Istanbul Convention did not bring respect for women's rights: Erdoğan. *DuvaR.English*.

Zuboidi, H. (2018). Kepentingan Utsmani Menjalinkan Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam . *Jurnal Peurawi* , 1(2).

Zurcher, E. J. (1993). *Turkey: A Modern History*. I.B. Tauris.